LEMHANNAS RI
NEWSLETTER

TIADA KEBENARAN YANG MENDUA

Edisi IV 20 November 2009

UCAPAN SELAMAT DARI GUBERNUR LEMHANNAS RI

Gubernur Lemhannas RI beserta segenap Keluarga Besar Lemhannas RI turut berbahagia dan menyampaikan SELAMAT kepada 2 anggota Dewan Pengarah serta 12 Alumni Lemhannas RI atas kepercayaan Presiden Republik Indonesia yang telah menunjuk dan menetapkan sebagai Wakil Presiden, Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Bersatu ke II Tahun 2009 - 2014

Prof. DR. Boediono
Dewan Pengarah Lemhannas RI
Sebagai
Wakil Presiden RI

Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto
Alumni KRA XXXII Lemhannas RI
Sebagai
Menko Polhukkam

Ir. M. Hatta Rajasa
Alumni KSA X Lemhannas RI
Sebagai
MenKo Perekonomian

Letjen TNI (Purn) Sudi Silalahi
Alumni KSA IX Lemhannas RI
Sebagai
Menteri Sekretaris Negara

Gamawan Fauzi
Alumni KSKA I Lemhannas RI
tahun 2001 Sebagai
Menteri Dalam Negeri RI

Prof.Dr.Ir.Purnomo Yusgiantoro,MSc
Alumni KRA XXV Lemhannas RI
Sebagai
Menteri Pertahanan RI

M.S. Hidayat
Dewan Pengarah Lemhannas RI
Sebagai
Menteri Perindustrian RI

Ir.Djoko Kirmanto,Dipl,HE
Alumni KRA XXVII Lemhannas RI
Sebagai
Menteri Pekerjaan Umum RI

Drs. Suharna Surapranata
Alumni KSA X Lemhannas RI
Sebagai
Menteri Riset & Teknologi RI

Letjen TNI (Purn) E.E.Mangindaan
Alumni KRA XXIII Lemhannas RI
Sebagai
Menteri PAN&Reformasi Birokrasi RI

Dr. Ir. Mustafa Abubakar
Alumni KSA IX Lemhannas RI
Sebagai
Menteri Negara BUMN RI

Jenderal Pol. (Purn) Sutanto
Alumni KSA X Lemhannas RI
Sebagai
Kepala Badan Intelijen Negara RI

Hermanto Dardak
Alumni KRA XXXIII Lemhannas RI
Sebagai
Wakil Menteri PU

Prof. DR. Ir. Alex Retraubun
Alumni PPRA XLII Lemhannas RI
Sebagai
Wakil Menteri Perindustrian

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan bimbingan, kesehatan dan perlindungan-Nya kepada kita semua dalam mengabdi kepada Bangsa dan Negara yang kita cintai.

DAFTAR ISI

1. Ucapan selamat dari Gubernur Lemhannas RI 1
2. Workshop Permodelan Sistem Ketahanan Nasional dan Simulasi Pengambilan Kebijakan Publik serta rancangan MOU antara Gubernur Lemhannas RI dengan para Gubernur Propinsi seluruh Indonesia 2
3. Indonesia Masa Depan : Peran Resimen Mahasiswa 3
4. Penggunaan E-Procurement Lemhannas RI 3
5. Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) - Lemhannas RI, ke Philiphina 4
6. Peresmian Relokasi Monumen Patung Ir. Soekarno Pendiri Lemhannas RI dan Renovasi Papan Nama Lemhannas RI 5
7. Aktualisasi Checks and Balances antar Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif pasca Pemilu 2009 Guna Menunjang Keberhasilan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional 2010-2014 6
8. Gubernur Lemhannas RI membuka acara KOMNAS Perempuan 7
9. Revisi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2008 dan penyusunan LAKIP tahun 2009 Lemhannas RI 8
10. Kebijaksanaan Umum Dewan Pengarah Lemhannas RI 9
11. Peringatan Hari Sumpah Pemuda 10

Workshop Permodelan Sistem Ketahanan Nasional dan Simulasi Pengambilan Kebijakan Publik serta Rancangan MOU antara Gubernur Lemhannas RI dengan para Gubernur Propinsi seluruh Indonesia

Gubernur Lemhannas memberikan sambutan pada acara pembukaan Workshop Permodelan Sistem Ketahanan Nasional dan Simulasi Kebijakan Publik

Workshop Permodelan Sistem Ketahanan Nasional dan Simulasi Kebijakan Publik di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI tanggal 27 Oktober 2009 dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, S.H. Workshop yang berlangsung dua hari tersebut diikuti oleh para Kepala Bappeda Provinsi, Kepala Biro Pusat Statistik Provinsi dan para wakil Perguruan Tinggi dari 33 Provinsi seluruh Indonesia.

Pada saat ini Lemhannas RI sedang membangun Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (LABKURTANNAS) yang akan berfungsi untuk memantau dan menganalisis tingkat/ indeks Ketahanan Nasional di Daerah dari 33 Propinsi melalui pendekatan berbagai gatra. Selain itu Lemhannas RI sedang merancang MOU antara Lemhannas RI dengan seluruh Gubernur Propinsi di Indonesia. Hal itu dilakukan mengingat bahwa Ketahanan Nasional kita masih perlu ditingkatkan, namun sampai saat ini belum memiliki sistem Informasi yang memadai untuk mendeteksi Ketahanan Nasional tersebut, termasuk dampak dinamika lingkungan strategis, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global untuk kepentingan Ketahanan Nasional. Informasi tersebut merupakan hal yang sangat penting sebagai bahan masukan bagi Presiden dalam mengambil keputusan, menetapkan langkah-langkah antisipatif yang akurat (*Anticipatory Resilience*), dalam rangka mendirikan Ketahanan Nasional.

Perubahan yang sangat cepat dan kompleks terkadang tidak terduga terhadap dinamika lingkungan strategis ternyata sangat mempengaruhi kondisi Ketahanan Nasional Indonesia, baik secara *agregat* maupun *parsial* pada masing-masing gatra, seperti terjadinya krisis keuangan global yang sangat *unpredictable* pada akhir-akhir ini. Dampak tersebut tidak hanya berpengaruh pada Ketahanan Ekonomi saja tetapi juga secara matriks mempengaruhi Ketahanan pada gatra sosial budaya, politik, bahkan keamanan.

Sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya, sejak tahun 2007 Lemhannas RI berkewajiban untuk membangun sistem informasi: 1. Yang akan mengukur Ketahanan Nasional sistem informasi tersebut akan di operasionalkan oleh Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional; 2. Laboratorium ini diharapkan menjadi salah satu program unggulan, di samping program-program unggulan lainnya yang harus diselesaikan sampai dengan tahun 2010; 3. Hasil Pengukuran Ketahanan Nasional diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai tingkat Ketahanan Nasional, daerah seluruh propinsi sehingga dapat dijadikan *early warning system* bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pembangunan Labkurtannas merupakan pengembangan dari Sistem Pengukuran Ketahanann Nasional yang selama ini hanya digunakan sebagai *academic exercise* bagi peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan dan Program Pendidikan Reguler Angkatan. Manfaat bagi Pemerintah Daerah sistem ini tidak hanya sebagai early warning system tetapi juga dapat digunakan sebagai sumber informasi perencanaan daerah, utamanya dalam menentukan prioritas pembangunan.

Sistem pengukuran tersebut tidak mungkin dapat dilakukan oleh Lemhannas sendiri, tetapi harus dalam suatu *networking/ corporatness* dan *inter-connected,* dengan melibatkan para pakar dari Perguruan Tinggi, LIPI dan para pemangku kepentingan dari Departemen terkait, seperti: Bappenas, BPS, Departemen Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan sebagainya.

Workshop merekomendasikan beberapa hal yang masih harus didalami dan dilihat kembali, baik mengenai dimensi, variabel, indikator, parameter bahkan instrumen yang telah dikembangkan oleh Lemhannas RI.

Salah satu peserta Workshop mengajukan pertanyaan dan memberikan saran

INDONESIA MASA DEPAN : PERAN RESIMEN MAHASISWA

Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH. Photo bersama dengan Resimen Mahasiswa Indonesia dalam acara Rakornas tanggal 14 Oktober 2009 di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH. pada saat membuka kegiatan Rakornas Menwa menyatakan visi pembangunan nasional 2000-2025 sesuai UU No. 17 Tahun 2007, digambarkan kondisi Indonesia masa depan sebagai "Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur", dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI 1945, karenanya perlu didukung oleh:

1. Komitmen dari kepemimpinan nasional yang kuat dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah;
3. Keberpihakan kepada rakyat; dan
4. Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

Guna mewujudkan hal tersebut perlu peran serta kaum muda yang berkualitas sebagai *"potential leaders"* di masa depan, khususnya sebagai *"driving force"* pembangunan nasional. Namun generasi muda intelektual juga harus sadar bahwa sebagai kelompok pembaharu yang menentukan keberhasilan transformasi menuju masyarakat yang makmur, demokratis dan terbuka, mereka tidak berdiri sendiri. Suatu hal yang perlu dicatat dalam proses reformasi di Indonesia adalah tidak digunakannya sistem revolusi tetapi yang digunakan adalah sistem evolusi yang dipercepat *(accelerated evolution)*. Gubernur Lemhannas RI juga menegaskan bagi semua komponen untuk dapat menyadari pelbagai tantangan *(threats)* yang sekaligus merupakan peluang *(opportunity)* untuk Indonesia masa depan. Perlu dihayati bahwa siapa saja, termasuk generasi muda yang berkeinginan untuk menjadi pemimpin bangsa di masa depan agar bisa berperan serta untuk mengadakan perubahan dan pencapaian tujuan nasional.

PENGGUNAAN E-PROCUREMENT LEMHANNAS RI

Berkaitan dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Lembaga Pemerintahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Lemhannas RI melakukan kerja sama dengan PT Sucofindo melalui pelatihan dalam rangka penggunaan komputer berbasis IT untuk keperluan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (*E-Procurement*) di lingkungan Lemhannas RI. Pelatihan *E-Procurement tersebut berlangsung* pada tanggal 13 Oktober 2009.

Manfaat penerapan penggunaan *E-Procurement* merupakan salah satu wujud penerapan *E-Government* di lingkungan pemerintah, sehingga pengadaan barang dan jasa menjadi transparan dan terbuka serta proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efektif dan efisien.

Dengan keunggulan ICT yang di aplikasikan dalam *E-Procurement,* maka masyarakat dapat mengakses berbagai informasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa secara jelas dan utuh. *E-Procurement* pengadaan barang dan jasa ini dapat dilakukan secara online berbasis internet secara terintegrasi dengan manajemen asset.

Para peserta Pelatihan E-Procurement sedang memperhatikan paparan di Laboratorium Komputer Telematika Lemhannas RI

Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) PPRA XLIII Lemhannas RI ke Philipina

Ketua Rombongan dan Perwakilan peserta SSLN foto bersama dengan beberapa staf salah satu instansi pemerintah Philipina setelah selesai acara kegiatan kunjungan

Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIII tahun 2009 yang berjumlah 98 peserta termasuk 4 (empat) peserta dari negara-negara sahabat yakni dari Australia, Malaysia, Thailand dan Singapura menjelang akhir pendidikannya telah melaksanakan salah satu kegiatan utama yaitu Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) ke Australia, China, Philipina, Vietnam dan Brunei Darussalam pada tanggal 11 s.d 16 Oktober 2009.

Newsletter edisi kali ini menampilkan hasil kunjungan SSLN ke Philipina. Hal ini karena negara tersebut banyak mengalami kehidupan dari berbagai aspek kehidupan nasionalnya, sehingga terjadi instabilitas nasional terutama masalah keamanan. Dalam rangkaian kunjungannya selama lima hari peserta memperoleh pengetahuan dan menambah wawasan yang sangat berharga.

Saat kunjungan di negara tersebut sedang mengalami bencana alam yaitu banjir, namun rombongan peserta SSLN tetap dapat melakukan seluruh kegiatan dengan baik sesuai program yang disiapkan .

Rombongan peserta SSLN melaksanakan kunjungan ke berbagai instansi Pemerintah Philipina yaitu mengunjungi Subic dan Clark, bekas pangkalan militer Amerika Serikat yang sudah ditutup sejak tahun 1992 dikarenakan perpanjangan kontraknya ditolak oleh parlemen Philipina. Saat ini kedua tempat tersebut dikembangkan menjadi daerah ekonomi khusus dan pelabuhan bebas yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi di Philipina.

Kunjungan lainnya adalah ke *Department of Trade and Industri/DTI* dan *ARMS Corporation of the Philipine* (ARMSCON) yaitu suatu perusahaan negara yang memproduksi senjata. Dari dua tempat tersebut diperoleh informasi mengenai kebijakan, strategi dan kemajuan yang dicapai pemerintah Philipina dalam bidang perdagangan, industri dan kemandirian penyediaan persenjataan dalam negeri.

Kunjungan menarik yang lain adalah kunjungan ke tiga instansi pemerintah Philipina; yakni *National Defence College of the Philippines* (NDCP), *Department of Interior Local Government* (DILG) dan *Office of the Presidential Advise on Peace Process* (OPAPP).

Dari kunjungan ke NDCP, rombongan mendapat penjelasan tentang:

1. *"Philippine Defence Policy: Strategic Outlook, issues and Challenges"* oleh Gladys Cagadoc (dari *Office of the Assistant Secretary for Plans and Programs*, DND).
2. "*Vision, Mission, Organization and Activities of NDCC*" oleh Atty Priscilla Duque, MNSA dari OCD.
3. "*NDCP Mission, Organization and Funtions*" oleh Mr. Clarence Anthony P. Dugenia (*Defence Research officer, NDCP*).

Tukar menukar cinderamata antara delegasi Lemhannas RI dengan Hon. Ronaldo V. Puno (Secretary of DILG) dan Gen Jesus A. Verzosa (Police Chief Director).

PERESMIAN RELOKASI MONUMEN PATUNG Ir. SOEKARNO PENDIRI LEMHANNAS RI DAN RENOVASI PAPAN NAMA LEMHANNAS RI

Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH, meresmikan Relokasi Monumen Patung Ir. Sukarno, Pendiri Lemhannas RI di depan Gedung Asta Gatra Lemhannas RI

Bersamaan dengan memperingati hari Pahlawan, 10 November 2009, tanpa mengurangi atau menghilangkan konteks sejarah gagasan pembangunan awalnya, dilakukan peresmian dan relokasi patung Ir. Soekarno ke bagian tengah kompleks Lemhannas RI, tepatnya di depan Gedung Astagatra. Renovasi papan nama Lemhannas RI dan relokasi monumen patung Ir. Soekarno merupakan momen yang paling tepat pada saat bangsa ini memperingati hari pahlawan, karena hal itu sebagai simbol untuk menghormati dan mengabadikan sikap heroik yang ditampilkan beliau sebagai pahlawan kusuma bangsa, proklamator kemerdekaan, pimpinan dan patriot bangsa serta sebagai Bhayangkari Negara terutama dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Relokasi patung Ir. Soekarno di tempat yang lebih baik ini diharapkan agar lebih mudah bagi kita mengenang beliau dan agar dapat menumbuhkan inspirasi serta memahami pesan moral yang terkandung dalam Teks Prasasti Monumen Patung Ir. Soekarno, Brigjen Pol. DR. H. M. Said Saile, M.Si selaku Ketua Panitia Peresmian relokasi monumen patung Ir. Soekarno dan renovasi papan nama Lemhannas RI menyampaikan bahwa kegiatan tersebut di ilhami oleh gagasan Prof. DR. Muladi, SH. Gubernur Lemhannas RI atas penghargaan kepada pendiri Lemhannas RI, yang antara lain penempatan yang terhormat untuk Patung Ir. Soekarno yang semula ditempatkan disisi pagar pemisah Lemhannas RI dengan kantor Gubernur DKI Jakarta, di pindahkan di depan Gedung Asta Gatra Lemhannas RI.

Pembukaan Selubung Papan Nama Lemhannas RI yang baru

AKTUALISASI CHECKS AND BALANCES ANTAR LEMBAGA EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN YUDIKATIF PASCA PEMILU 2009 GUNA MENUNJANG KEBERHASILAN KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN NASIONAL 2010-2014

Rountable Discussion Sosbud dengan tema " Aktualisasi Checks and Balances Antar Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, Pasca Pelaksanaan Pemilu 2009 guna menunjang keberhasilan kebijakan Strategi Pembangunan Nasional 2010 - 2014" dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI tanggal 27 Oktober 2009 di Ruang Rapat Nusantara I Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH pada acara *Roundtable Discussion* di Lemhannas RI pada tanggal 27 Oktober 2009 menyampaikan bahwa Aktualisasi *Checks and Balances* antara lembaga Negara dianggap efektif apabila masing-masing lembaga dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara baik, hal tersebut ditandai oleh dua faktor **pertama** meningkatnya kinerja lembaga dalam mendapatkan solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah, dan yang **kedua** Kebijakan yang disusun dirumuskan sesuai dengan keputusan secara rasional.

Guna mewujudkan Aktualisasi *Checks and Balances* antar lembaga Negara, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : **Pertama,** kesatuan bersifat menyeluruh (*Wholism and Unity*) ; **kedua,** hubungan saling ketergantungan fungsional (*Interrelatedness*); **ketiga,** adanya tujuan yang sama (*Purposive Behavior*); **keempat,** keterbukaan (*Openness*); **kelima,** transformasi nilai antar Sub Aktualisasi (*Value Transformation*), dan **keenam,** mekanisme pengendalian terpadu (*Control Mechanism*).

Perlunya aktualisasi *checks and balances* karena selama ini belum maksimalnya masing-masing lembaga negara mengembangkan budaya organisasi (*Behavior*) yang mendukung rasionalisasi keputusan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai evaluasi kinerja lembaga negara baik itu kinerja Legislatif, Eksekutif maupun yudikatif secara berkesinambungan (*Steady State*). Untuk itu dalam Aktualisasi *Checks and Balances* mensyaratkan harus adanya keseimbangan posisi antar lembaga negara, tidak bersifat tertutup (*Closed System*) dimana interaksi dengan lingkungan sangat kecil sehingga bisa diabaikan, dan dalam menjalankan fungsinya harus terbuka (*Open System*).

Mencermati Proses Pemilu 2009 dan kondisi faktual serta aktual pola hubungan kelembagaan saat ini, apabila tidak segera disikapi secara rasional dan proporsional akan dapat menghambat pembangunan nasional bahkan instabilitas nasional. Pengalaman selama ini menunjukkan ketegangan antara MA dan BPK terkait dengan hal menjalankan fungsi dan kewenangan, DPR RI dengan Pemerintah (Presiden RI) yang ditandai dengan penggunaan hak angket yang tidak jelas arahnya, terakhir ketegangan antara KPU dengan MA, dan masih banyak lagi kasus yang menunjukkan betapa belum tumbuh dan berkembangnya *Checks and Balances* dalam kelembagaan saat ini. Oleh karena itu penerapan prinsip-prinsip *Checks and Balances* perlu segera dilakukan dan dikembangkan pada perilaku organisasi kelembagaan (*Institusional Behavior*) Negara.

GUBERNUR LEMHANNAS RI MEMBUKA ACARA KOMNAS PEREMPUAN

Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Muladi, SH membuka acara KOMNAS Perempuan dalam rangka uji publik *Qanun Jinayat*, pada hari kamis 29 Oktober 2009 di Gd.Trigatra Lt. III Barat Lemhannas RI. KOMNAS Perempuan dalam mengadakan penelitian dan menginventarisasi serta mengkritisi lebih lanjut mengenai pembuatan *Qanun* dan Perda-perda provinsi lainnya, khususnya yang dirasakan mengandung elemen diskriminasi yang selalu mengandung konotasi negative (*exclusion or rejection*), antara lain berupa perlakuan terhadap seseorang dari kelompok tertentu atas dasar pertimbangan kelas atau kategori seperti: ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul, kekayaan, kelahiran atau status lainnya, yang melanggar asas "*equality before the law*", artinya bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
Gerakan feminisasi merupakan gerakan yang bersifat universal sejak tahun 1990 atas dasar pengalaman empiris para perempuan yang selalu menjadi korban perbuatan diskriminatif sebagai "*global issue*". *Qanun jinayah* beserta qanun hukum acara *jinayah* dilandasi oleh syariat Islam di Nangroe Aceh Darusalam. Dalam pembahasannya banyak menimbulkan kontroversi. Bagi yang menentang menuntut *Qanun* perlu revisi karena menganggap *Qanun* memuat sejumlah sanksi (hukuman fisik), sedangkan rancangan tersebut belum disosialisasikan kepada masyarakat dan hanya menyentuh rakyat lapisan bawah serta terkesan dirancang tergesa-gesa oleh DPRD, *Qanun Jinayah* bukan jawaban bagi kebutuhan masyarakat Aceh terhadap masalah moral dan sosial juga bagi potensi menimbulkan konflik baru dan tidak menjamin kepastian hukum (multi tafsir) serta mengarah pada kriminalisasi bagi orang yang tidak bersalah khususnya perempuan. Sedangkan bagi pendukung Qanun, menyatakan bahwa: masyarakat tidak perlu menolak *Qanun Jinayah* jika tidak ada niat berzina kenapa mesti takut. Pemberlakuan syariah Islam ini menimbulkan kontroversi pada tingkat nasional yang diwarnai dengan perbedaan pendapat antara yang pro dan kontra. Harus diakui cepat atau lambat akan menyentuh Undang-undang Dasar 1945 yang mengukuhkan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan dan ketentuan-ketentuan tentang HAM yang diatur pasca amandemen.

Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH, membuka Acara Kajian Hukum Tentang Qanun Jinayat di Lemhannas RI, yang didampingi panitia penyelenggara dari KOMNAS Perempuan pada tanggal 29 Oktober 2009

REVISI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2008 DAN PENYUSUNAN LAKIP TAHUN 2009 LEMHANNAS RI

Brigadir Jenderal Pol. Drs. Alpiner Sinaga sedang memimpin Rapat Pembahasan awal Revisi Indikator Kinerja Lemhannas RI Tahun 2008 pada tgl. 20 Oktober 2009 di Ruang Rapat Nusantara II Lemhannas RI

Dalam rangka implementasi pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Inspektorat Lemhannas RI melakukan revisi LAKIP tahun 2008 dan penyusunan LAKIP 2009. Acara dibuka oleh Brigadir Jenderal Pol. Drs. Alpiner Sinaga dan dilanjutkan paparan tentang hasil Evaluasi Kementerian Negara PAN atas Akuntabilitas Kinerja Lemhannas RI tahun 2007. Lima komponen yang dinilai dalam evaluasi Kementerian Negara PAN atas akuntabilitas kinerja Lemhannas adalah, ***Pertama***, Perencanaan kinerja. ***Kedua***, Pengukuran kinerja. ***Ketiga***, Pelaporan kinerja. ***Keempat***, Evaluasi kinerja. ***Kelima***, capaian kinerja. Revisi LAKIP tahun 2008 dan penyusunan LAKIP tahun 2009 Lemhannas RI mempunyai Rencana Strategik yang meliputi : tujuan, sasaran (uraian dan indikator) , kebijakan, dan program. Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. LAKIP mempunyai empat sistem: ***pertama*** Perencanaan kinerja, ***kedua*** Pengukuran kinerja, ***ketiga*** Pelaporan kinerja, ***keempat*** Evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja.

Alat-alat dalam mengukur akuntabilitas dengan sasaran implementasi sistem AKIP, ***pertama***, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; ***kedua***, terwujudnya transparansi instansi pemerintah; ***ketiga***, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; ***keempat***, terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

KEBIJAKSANAAN UMUM DEWAN PENGARAH LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH di dampingi Anggota Dewan Pengarah Prof. DR. Malik Fajar, membuka Diskusi Intellectual Exercise Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Nasional tanggal 26 Oktober 2009 di Gd. Astagatra Lt. III Barat Lemhannas RI

Berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 67 tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lemhannas RI dijelaskan bahwa sudah memasuki tahun ke tiga dari perencanaan lima tahun, sehingga organisasi Lemhannas RI akan dilakukan evaluasi tahap pertama pada tahun 2009. Sesuai Surat Keputusan Dewan Pengarah Lemhannas RI No: Skep/03/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 tentang Kebijaksanaan Umum Dewan Pengarah Lembaga Ketahanan Nasional RI untuk Program Kerja dan Anggaran Lemhannas RI Tahun Anggaran 2009, evaluasi diarahkan pada kompetensi setiap pejabat pegawai negeri mengenai organisasi, tugas dan fungsi yang difokuskan pada profesional, proporsional, efektif, efisien, ramping dan modern. Penyusunan dilakukan dengan prinsip semua tugas dibagi habis, proposional dan tidak tumpang tindih antar sesama satuan kerja, maupun di dalam satuan kerja. Semua unsur di lingkungan Lemhannas RI dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk tercapainya tugas dan fungsi, baik di dalam lingkungan Lemhannas RI sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Evaluasi tahap kedua dilakukan tahun 2010 meliputi validasi diarahkan kepada efektifitas dan efisiensi Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lemhannas RI. Pelaksanaan tugas dan fungsi Lemhannas RI mencakup bidang Kesektamaan, Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Deputi Bidang Pengkajian Strategik, Deputi Bidang Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan, Tenaga Ahli Pengajar dan Tenaga Ahli Pengkaji, Tenaga Profesional dan Inspektorat Lemhannas RI.

PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA

Delapan puluh satu tahun yang lalu, yakni pada 28 Oktober 1928, kerukunan pemuda-pemudi Indonesia berikrar: **" Kami Putra dan Putri Indonesia, bertanah air satu: Tanah Air Indonesia, berbangsa satu: Bangsa Indonesia, berbahasa satu: Bahasa Indonesia."** Sejak saat itu hampir setiap tahun peristiwa sejarah tersebut diperingati oleh Bangsa Indonesia. Memperingati Sumpah Pemuda merupakan peristiwa bersejarah yang sangat penting dan strategis untuk membangun perubahan dan pembaharuan guna meningkatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa yang demokratis serta merefleksikan kembali perjalanan sejarah kepada generasi penerus bangsa.

Sebagai ideologi nasional dan dasar negara, Pancasila merupakan perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan cita-cita nasional secara tegas telah dirumuskan dengan lima suku kata: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Untuk mencapai cita-cita nasional, para pendiri negara memberi tugas kepada pemerintah negara untuk mencapai tujuan nasional "melindungi seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Kesemuanya itu diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sejak reformasi bergulir, demokrasi telah mengindikasikan ke arah positif,yang ditandai dengan berbagai perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Demokratisasi memacu tumbuhnya semangat untuk menyampaikan aspirasi, dan kebebasan pers yang melakukan kontrol sosial secara efektif, begitu juga hukum dan HAM terus ditegakkan. Di sisi lain demokrasi sering disalah artikan oleh sebagian golongan masyarakat sehingga mengganggu kelancaran pembangunan nasional. Berkaitan dengan itu, bahwa aktualisasi peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2009 ini, antara lain bertujuan untuk menjawab berbagai kelemahan pembangunan, yang merupakan tanggung jawab seluruh bangsa tanpa terkecuali termasuk Lemhannas RI untuk meningkatkan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing secara optimal.

Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH. Membacakan amanat dalam rangka Hari Sumpah pemuda yang ke - 81 tanggal 28 Oktober 2009

Pengarah : *DR. Ardi Partadinata, MH, M.Si.* **Penanggung Jawab :** Brigjen TNI Kusworo,
Redaktur : *Kolonel Ckm (K) Dr. Zawiah Ramlie, MH, M.Sc* **Penyunting/Editor :** *Djoko Saksono, Kolonel Caj. M. Sochib SM., Letkol Adm. Drs. M. Syahril, MM, Mayor Inf. Risnal SH. MA.*
Redaktur Pelaksana : *Linda Purnamasari. , Mayor Caj (K) Rita Ratnayu*
Desain Grafis & Fotografer : *Arief Musadayan, Arianto, Bambang Iman A, Hendrik Garang,* **Sekretariat :** *Syafrizal, Gatot*
Alamat Redaksi : *Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Merdeka Selatan No. 10 Jak-Pus (10110)*
Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926